URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK DI KABUPATEN PRINGSEWU

1. LATAR BELAKANG : Globalisasi, pertumbuhan jumlah penduduk, dan perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan suatu negara dalam menjamin hak hidup yang layak bagi penduduk di wilayahnya. Tren pertumbuhan ekonomi yang positif disokong oleh berputarnya roda perekonomian, salah satunya dipicu melalui investasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disusun dalam rangka mempermudah iklim investasi di Indonesia. Kemudahan investasi khususnya dalam hal pengurusan perizinan bermula dari dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi perizinan sesuai kewenangannya.

Salah satu implikasi dari kemudahan investasi adalah kebutuhan yang meningkat terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini menjadi dasar dibutuhkannya pengendalian pemanfaatan ruang agar setiap kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang sehingga dapat mencegah tumpang tindih penggunaan ruang dan turunnya kualitas lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga mengatur tentang aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang diatur dalam

kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah (1) Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK; (2) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang; (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif; (4) Pengenaan Sanksi; dan (5) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagai salah satu perangkat pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR, pemenuhan prosedur perolehan KKPR dan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ini dilakukan selama pembangunan dan pasca pembangunan oleh instansi yang mengeluarkan KKPR, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK di Kabupaten Pringsewu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki dokumen hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- b. Tujuan
Menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dan menilai pernyataan mandiri pelaku UMK.
3. SASARAN : Sasaran pekerjaan ini adalah :
- 1) Teridentifikasinya kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan melalui KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - 2) Terevaluasinya hasil pengolahan data pelaksanaan ketentuan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
 - 3) Teridentifikasinya dampak terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
 - 4) Tersusunnya arahan tindak lanjut hasil penilaian.